BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Hukum waris Islam berlandaskan pada aqidah dan prinsip keadilan syariah, di mana keislaman merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menjadi ahli waris sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan konsep *mawāni' al-irs* (penghalang waris) seperti pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan memperlihatkan bahwa hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, melainkan juga erat kaitannya dengan keimanan dan ketaatan terhadap syariat. Salah satu bentuk penghalang waris yang sangat tegas adalah kemurtadan. Seorang Muslim yang murtad dianggap telah memutuskan hubungan keagamaan yang menjadi syarat dasar untuk memperoleh harta waris, sehingga secara otomatis gugur dari kedudukannya sebagai ahli waris. Namun demikian, hingga saat ini, kedudukan ahli waris yang telah murtad di Indonesia belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ditafsirkan berdasarkan ketentuan KHI, maka jelas bahwa ahli waris yang murtad tidak berhak menjadi penerima warisan.

Kedua, Pertimbangan Yuridis dalam Putusan Pengadilan: Antara Konsistensi Syariat dan Keadilan Sosial. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.Sby, hakim secara tegas mengakui bahwa status murtad merupakan penghalang waris. Namun, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang telah murtad menimbulkan perdebatan normatif maupun teologis. Penerapan wasiat wajibah dalam perkara tersebut tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung,

yang pertama kali ditetapkan dalam Putusan MA No. 368 K/AG/1995, di mana Mahkamah Agung memberikan dasar bagi pengadilan agama untuk memperluas penggunaan wasiat wajibah dalam rangka memenuhi asas kemaslahatan. Kendati demikian, penggunaan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang murtad dinilai melampaui batas ketentuan syariah dan berpotensi mengaburkan prinsip hukum waris Islam yang sudah baku. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar upaya menegakkan keadilan sosial melalui instrumen yurisprudensi tidak sampai bertentangan dengan aqidah dan prinsip hukum Islam yang bersifat tetap.

4.2 Saran

1. Pemerintah, khususnya lembaga yang berwenang dalam hukum keluarga Islam, diharapkan dapat bersikap lebih tegas dan konsisten dalam menangani perkara waris yang melibatkan perbedaan agama atau kemurtadan. Ketegasan ini penting agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemerintah perlu mendorong peradilan agama agar tidak memberikan ruang kompromi yang bertentangan dengan aqidah, seperti pemberian hak waris melalui jalur wasiat wajibah kepada pihak yang secara syar'i telah kehilangan haknya. Penegasan ini bukan berarti melakukan pembaruan regulasi, melainkan meneguhkan kembali batas-batas hukum Islam dalam praktik peradilan agar tidak tergerus oleh tekanan sosial atau tafsir yang menyimpang.
2. Bagi Praktisi Hukum dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Dalam memutus perkara waris yang melibatkan perbedaan agama atau ahli waris

yang murtad, para hakim hendaknya lebih berhati-hati dan tidak gegabah dalam menerapkan konsep wasiat wajibah. Penerapan wasiat wajibah seharusnya tetap berada dalam koridor hukum syar'i dan tidak diberikan kepada pihak yang secara tegas telah terhalang mewaris karena alasan teologis, seperti murtad. Konsistensi antara putusan pengadilan dan nilai-nilai dasar hukum Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah perlu dijaga agar keadilan yang ditegakkan benar-benar selaras dengan aqidah umat Islam.

3. Masyarakat Muslim perlu diberikan edukasi hukum yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga kesatuan akidah dalam keluarga, terutama dalam aspek waris. Pemahaman terhadap akibat hukum dari kemurtadan serta perbedaan agama dalam pewarisan perlu ditingkatkan, guna mencegah konflik keluarga pasca wafatnya pewaris. Dalam keluarga yang terdapat perbedaan keyakinan, disarankan agar pewarisan dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama melalui mekanisme wasiat atau hibah yang sah secara syar'i. Hal ini penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari serta meminimalisir keterlibatan pengadilan dalam pelaksanaan waris.